

No. 161 Juni - Juli 2019

BaktiNews

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



MUSRENBANG INSPIRASI
MENGINSPIRASI DARI PAPUA

MENJALIN NOKEN
UNTUK GENERASI EMAS PAPUA

MEMPERKUAT PEREMPUAN
DI KOMUNITAS

ANALISIS SITUASI STUNTING
KABUPATEN KUBU RAYA

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL

Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU
FADHILAH MANSYUR

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**NEWS**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI News

Juni - Juli 2019

No. 161

-
- 1** MUSRENBANG INSPIRASI
Menginspirasi dari Papua
Oleh **FADHILAH MANSYUR**
- 5** Analisis Situasi *Stunting*
Kabupaten Kubu Raya
Oleh **AFRIZAL ABDUL RASYID**
- 9** Sampah dan
Revolusi Daur Ulang
Oleh **DANIEL KALIGIS**
- 13** "PAPA SEHAT"
Kontrol Kesehatan Peserta Didik
di Sekolah
Oleh **H. ABDUL AZIS**
- 17** Malaria Center untuk Papua
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 21** Meningkatkan Hasil Belajar,
KIAT Guru diperluas
Oleh **SHARON KANTHY**
- 25** Guru Felix Karubaba
Mendidik Anak-anak Asmat dengan Kasih
Oleh **PETRUS SUPARDI**
- 29** Menjalin Noken
untuk Generasi Emas Papua
Oleh **LUNA VIDYA MATULESSY**
- 33** Menuju Pohuwato Bebas Sampah Plastik
Oleh **CITRA AYU MENTARI AL RASYID**
dan **AMSURYA WARMAN AMSA**
- 36** Memperkuat Perempuan di Komunitas
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 39** BaKTI News Online
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

■ Foto Cover : Victoria Ngantung/Yayasan BaKTI




Sekelompok siswa di sebuah Sekolah Dasar beramai-ramai mengumpulkan minyak jelantah dari rumah untuk dijual. Uang hasil penjualan dapat dimanfaatkan sekolah untuk membiayai beragam kegiatan ekstrakurikuler. (Foto : Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI)

MUSRENBANG INSPIRASI

Menginspirasi dari Papua

Oleh **FADHILAH MANSYUR**

Saat ini, upaya peningkatan SDM Papua telah membuahkan hasil yang luar biasa dengan jumlah IPM yang mencapai 58,06% pada Tahun 2017 dan meningkat sebanyak 1,64 pada Tahun 2018 menjadi 60,6 % yang menjadikan Papua menjadi provinsi dengan kategori IPM sedang.



Musyawarah Perencanaan Pembangunan – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua tahun 2020 menjadi sebuah momentum penting dalam pembangunan Papua. Ini adalah Musrenbang pertama yang diadakan dalam periode pembangunan Papua tahun 2018 – 2023. Dalam Musrenbang ini, pemerintah provinsi dan kabupaten menyelaraskan rencana pembangunan yang diajukan dengan mengacu pada RPJMD Papua 2018 – 2023. Menyadari pentingnya Musrenbang RKPD 2020 ini, Pemerintah Provinsi Papua melakukan sebuah pendekatan inovatif dalam



Foto : Fadhilah Mansyur/Yayasan BaKTI

menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah yang disebut Musrenbang Inspirasi.

Musrenbang Inspirasi bertujuan menyediakan input bagi proses Musrenbang RKPD formal melalui pertukaran informasi dan pengetahuan antar pemangku kepentingan tentang praktik baik yang tepat guna untuk pembangunan Papua. Musrenbang Inspirasi mempertemukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan berbagai aktor pembangunan untuk saling bertukar pengetahuan tentang praktik-praktik baik pembangunan daerah.

Kepala BAPPEDA Provinsi Papua, Drs. Muhammad MUSAAD, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa "Musrenbang Inspirasi

ini memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemangku kepentingan pembangunan untuk melakukan sinkronisasi secara efisien berdasarkan data pembangunan terkait dengan pendekatan tepat guna sehingga dapat menghindari *trial* dan *error* dalam pendekatan pembangunan di Papua.

Papua saat ini sangat jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, upaya peningkatan SDM Papua telah membuahkan hasil yang luar biasa dengan jumlah IPM yang mencapai 58,06% pada tahun 2017 dan meningkat sebanyak 1,64 pada tahun 2018 menjadi 60,6% yang menjadikan Papua menjadi provinsi dengan kategori IPM sedang.

Papua Bangkit

Pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan penghargaan 'Papua Bangkit' kepada kabupaten-kabupaten yang berhasil mengurangi Angka Kemiskinan Terbaik yaitu Kabupaten Lanny Jaya, Deiyai, dan Yahukimo, kabupaten dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik yaitu Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang dan Lanny Jaya, serta kabupaten dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terbaik yaitu Kabupaten Yahukimo, Waropen dan Puncak Jaya. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh para perwakilan masing-masing kabupaten.

Salah satu kabupaten yang menjadi perhatian saat penerimaan penghargaan tersebut adalah Kabupaten Lanny Jaya yang memborong dua penghargaan dari kategori berbeda, yaitu peningkatan IPM terbaik dan penurunan angka kemiskinan. Lanny Jaya berhasil meningkatkan indeks IPM dalam kurun waktu 2015-2017 sebesar 2,31 point dari 44,18 pada tahun 2015 menjadi 46,49 pada tahun 2017. Selain itu, angka kemiskinan di kabupaten tersebut juga menurun dalam kurun waktu 2015 – 2017 sebesar 2,37% dari 41,97% pada tahun 2015 menjadi 39,6% pada tahun 2017. Kedua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Christian Sohilait.

Menurut Sohilait, salah satu kunci penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka IPM di Lanny Jaya adalah program pemberian dana tunai sebesar satu juta rupiah per bulan kepada setiap kepala keluarga. Namun, tidak semua warga bisa menerima dana tersebut. Mereka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, rekening bank, kebun secara massal, dan memiliki usaha lebih dari dua (ternak ayam, kelinci dan babi dan lain sebagainya). Selain itu, Pemkab Lanny Jaya juga mewajibkan bagi kepala keluarga untuk mengajarkan membaca bagi anggota keluarga yang masih buta huruf.

Syarat-syarat tersebut, secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk mempunyai penghasilan sampingan dari usaha kebun dan ternak juga membantu mengurangi tingkat buta huruf. Saat ini, angka buta huruf di Lanny Jaya mencapai 40 ribu. Menurut Christian, kabupaten menargetkan angka tersebut dapat turun hingga 50% dalam 5 tahun kedepan. "Beginilah cara kami untuk sejahteraan mereka" Ungkap Sekda Lanny Jaya yang telah menjabat sejak tahun 2013 ini.

Pembangunan Rendah Karbon

Pada kesempatan Musrenbang Inspirasi ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Pembangunan Rendah Karbon antara Pemerintah Provinsi Papua dan BAPPENAS yang diwakili oleh Deputy Menteri Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc. Selain itu diserahkan juga Peraturan Gubernur Papua No.22/2018 tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon yang akan menjadi payung hukum untuk perencanaan provinsi dan kabupaten untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

Tujuan penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah mengurangi emisi gas karbon dioksida akibat deforestasi dan degradasi hutan. Dalam hal ini, Bappenas juga akan terlibat dalam pembangunan Papua yang akan mengutamakan konsep rendah karbon dengan mengusung empat hal. Pertama mengurangi deforestasi hutan dan meningkatkan kegiatan reforestasi. Kedua memprioritaskan penggunaan energi terbarukan; ketiga pengelolaan sampah yang sesuai prosedur; dan keempat, meningkatkan produksi pertanian.

Menurut Wakil Gubernur Papua, Klemen Tina, S.E., M.M dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, pemerintah daerah akan lebih ketat dalam melakukan pemberian izin pembangunan sehingga tercipta sebuah kota di mana warganya bisa bergerak, bernapas, dan produktif. Sehingga ada produktivitas modal dan sumber daya memperkaya, bukan merusak, hutan dan tanah, serta investasi pada sumber daya manusia. Selain itu, beliau juga menambahkan, apabila perusahaan-perusahaan besar yang multi nasional masuk ke Papua dan mengeluarkan karbon dioksida yang cukup banyak. Maka sebagai kompensasinya, perusahaan itu harus membayar kepada masyarakat setempat.

Pada kesempatan tersebut juga, Wakil Gubernur Papua meminta dukungan dari para ondoafi atau ondofole (kepala adat atau suku) untuk tidak memberikan izin secara bebas apabila ada yang ingin membeli dan mengelola tanah adatnya.

Salah satu agenda utama pada kegiatan ini juga adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Kemendagri yang diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, DR. Ir. Muhammad Hudori, M.Si., meluncurkan Integrasi *e-Planning* SIPD dan e-PPR. Integrasi dilakukan dengan penyediaan *Application Programming Interface* yang memungkinkan pemerintah pusat untuk dapat mengakses e-PPR, dan Pemerintah Papua dapat mengakses *e-Planning* SIPD.



Kabupaten Lanny Jaya, yang diwakili oleh Sekda Lanny Jaya, Christian Sohilait (kanan) menerima penghargaan Papua Bangkit sebagai Kabupaten dengan peningkatan IPM terbaik dan penurunan angka kemiskinan tertinggi dari BAPPENAS yang diserahkan oleh Deputi Menteri Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc.

Melalui integrasi ini, koordinasi dan penyesuaian rencana kerja daerah dan pusat akan lebih mudah dilaksanakan serta dukungan daerah untuk prioritas nasional atau dukungan nasional untuk prioritas daerah dapat lebih mudah terpetakan.

Pertukaran Informasi

Salah satu hal yang menarik dari Musrenbang Inspirasi ini adalah pertukaran informasi dan pengetahuan antar pemangku kepentingan tentang praktik baik yang tepat guna untuk pembangunan Papua. Informasi yang dipertukarkan meliputi beberapa bidang pembangunan seperti penanggulangan bencana, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan lingkungan hidup.

Pertukaran informasi tersebut dibagi dalam beberapa sesi inspirasi. Sesi pertama mengenai kebijakan Pembangunan Hijau Berbasis Wilayah Adat oleh *World Agroforestry (ICRAF)* dan TAF,

Investasi hijau oleh IDH dan GEG, serta Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Wilayah adat. Sesi pertama ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan sejalan dengan pelestarian lingkungan dan alam dengan memastikan bahwa alam masih mampu menyediakan sumberdaya dan jasa lingkungan secara berkelanjutan untuk menopang kesejahteraan masyarakat.

Sesi kedua inspirasi dibawakan oleh perwakilan-perwakilan di bidang pendidikan, kesehatan dan generasi muda. Sesi kedua ini menekankan bahwa kunci utama dari pembangunan di Papua terletak pada generasi muda dan perkembangan sumberdaya manusia utamanya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email fadhilah.mansyur@bakti.or.id



Analisis Situasi *Stunting* Kabupaten Kubu Raya

Oleh **AFRIZAL ABDUL RASYID**



Foto : Ichsan Djunaid/Yayasan BaKTI

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak *stunting* juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, *stunting* dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2 hingga 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Prevalensi *stunting* selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah *stunting* perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 30,8 persen atau sekitar 7 juta

balita menderita *stunting*. Masalah gizi lain terkait dengan *stunting* yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (48,9%), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (6,2%), balita kurus atau wasting (10,2%) dan anemia pada balita.

Penurunan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki angka *stunting* tergolong tinggi, walaupun bukan tertinggi di provinsi ini, namun angka *stunting*nya fluktuatif dari tahun ke tahun. Menurut hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tiga tahun terakhir Prevalensi Balita *Stunting* atau perbandingan antara Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), posisi Kabupaten Kubu Raya sangat memprihatinkan, pada tahun 2015 adalah 19,1 persen, pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 29,3 persen dan pada tahun 2017 terus meningkat menjadi 34,8 persen. Sebagai data pembanding Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita pada level kecamatan tahun 2017, angka *stunting*nya tercatat 30,6 persen dan pada tahun 2018 kembali melakukan sensus Status Gizi Balita, angka *stunting*nya diketahui sebesar 25,6 persen.

Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk *stunting* adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan *stunting* menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap makanan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Keempat faktor tersebut



memengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

Untuk melihat penyebab *stunting* lebih jauh, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya bekerjasama dengan program MELAYANI telah melakukan analisis situasi berdasarkan data konvergensi untuk melihat penyebab *stunting* secara lebih mendalam. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan *tools* sederhana yang dikembangkan oleh Tim TA-Pool Dirjen Bina Bangsa Kemendagri.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan analisis data konvergensi *stunting* Kabupaten Kubu Raya agar mengetahui secara mendetail penyebab terjadinya *stunting*, menjadikan hasil analisis sebagai referensi dalam menyusun program pencegahan dan penanganan *stunting* di masa depan, meningkatnya pemahaman *stakeholders* dalam melakukan analisa situasi, sehingga dalam menyusun perencanaan dan penganggaran ke depan mampu menjawab permasalahan yang menjadi fokus daerah.

Proses Diskusi

Pada awalnya peserta diperkenalkan *tools* sederhana analisis situasi yang dikembangkan oleh Tim TA-Pool Dirjen Bina Bangsa Kemendagri, sesi ini difasilitasi oleh *coach* MELAYANI Kubu Raya. Setelah semua peserta telah memahami *tools* tersebut, peserta dari 7 Puskesmas diminta untuk memasukkan data ke dalam *tools* tersebut, di mana setiap peserta dari Puskesmas telah menyiapkan data sesuai dengan *tools* yang tersedia.

Ada hal menarik saat selesai input data oleh peserta, kemudian fasilitator *mentracking tools*, mengurutkan angka *stunting* dari terendah ke yang tertinggi, di sini kelihatan bahwa ada yang intervensinya sudah cukup baik namun angka *stunting*nya masih saja tinggi, begitu juga sebaliknya.

Dari hasil *tracking* ini dapat disimpulkan bahwa masih ada program/intervensi yang dilaksanakan oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan ataupun dinas lainnya belum berjalan maksimal di lapangan. Dan hal ini diakui oleh petugas dari Puskesmas.

Petugas Puskesmas menyadari bahwa masih banyak program yang berjalan sesuai harapan dan



Foto: Afrizal Abdul Rasyid/Yayasan BaKTI

Pengetahuan ibu hamil tentang *stunting* juga perlu ditingkatkan disamping mendorong pemberian ASI eksklusif dengan membentuk kelompok pendukung ASI.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya bekerjasama dengan program MELAYANI melakukan analisis situasi berdasarkan data konvergensi untuk melihat penyebab *stunting* secara lebih mendalam. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan *tools* sederhana yang dikembangkan oleh Tim TA-Pool Dirjen Bina Bangsa Kemendagri.

target capaian, kendati secara distribusi atau serapan anggaran sudah sangat maksimal. Situasi ini menjadi menarik ketika petugas sendiri mengakui hal itu.

Kegiatan ini telah menganalisa data sensus dari sebanyak 36 desa dan 7 Puskesmas. Dari hasil diskusi kelompok tentang penyebab masalah *stunting* diketahui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil telah tersalurkan namun tidak sepenuhnya dikonsumsi dengan baik. Selain masih rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif, minimnya pengetahuan ibu tentang pola asuh anak dan pemberian makanan bergizi juga memengaruhi terjadinya *stunting*. Pengetahuan dan keterampilan petugas dan kader kesehatan masih belum cukup dan ini memengaruhi valid tidaknya pengukuran tumbuh

kembang yang dilakukan kepada balita yang diperiksa di Puskesmas atau Posyandu.

Dari permasalahan di atas perlu adanya perbaikan layanan yang harus segera dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kubu Raya dan Puskesmas terutama dalam hal memantau Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang telah didistribusikan kepada ibu-ibu hamil dan balita serta meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dan kader Posyandu dalam melaksanakan pengukuran panjang dan tinggi badan balita. Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kubu Raya juga perlu memastikan pencatatan data hasil penimbangan berat badan balita di Posyandu yang terintegrasi untuk meningkatkan keakuratan data.

Di sisi lain, pengetahuan ibu hamil tentang *stunting* juga perlu ditingkatkan disamping mendorong pemberian ASI eksklusif dengan membentuk kelompok pendukung ASI.

Untuk melengkapi analisis situasi *stunting* Kabupaten Kubu Raya, peserta pertemuan telah menyepakati bahwa Dinas Kesehatan melalui Seksi Gizi akan menginput kembali data dari 13 Puskesmas dan 82 desa yang belum terinput pada aplikasi ini baik melalui pertemuan lanjutan seperti telah dilaksanakan maupun memanggil satu per satu Puskesmas untuk menginput data capaian dan data *stunting*.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program MELAYANI dapat menghubungi email info@bakti.or.id



Sampah dan Revolusi Daur Ulang

Oleh **DANIEL KALIGIS**

*Akan percuma semua regulasi kendali sampah,
jika tidak dijalankan.*

Sampah masih bertebaran, padahal regulasi sudah ada. Kebijakan tentang persampahan sudah dituang dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 1 sudah diatur tata cara pengelolaan sampah, Pasal 19 menetapkan tarif retribusi persampahan. Kemudian, sejak 2016, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sudah memberi tanggungjawab kepada tiap kecamatan untuk pengelolaan sampah terpadu.

Kendati program kendali sampah, pemilahan sampah dari tiap rumah disebut sudah berjalan. Medio Agustus 2018, Dinas Lingkungan Hidup sudah mendata jumlah bank sampah di Kota Manado, di mana ada dua dari dua puluh empat bank sampah dinyatakan sudah *online*. Mengapa urusan sampah masih jadi perkara?

“Tabiat orang Manado setau kita umumnya kantal deng Balanda pe ajaran, aturan, gaya, dan laeng-laeng. Maar, itu katu dulu. Di bawah taong 2000-an, atau lebeh persis di bawah taong 90-an. Noh, skarang coba lia jo tu predikat so muncul,



Foto: Hermes Rivera/unsplash.com

berarti so terjadi pergeseran sangat luar biasa,” ujar Denny Ramagiwa Ratulangi, pemerhati lingkungan dan pekerja seni, terkait pemberitaan di media massa nasional yang menyebut Manado, Sulawesi Utara, masuk dalam kategori kota besar terkotor di Indonesia.

Dikutip dari CNN, Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, mengatakan Manado dan Bandar Lampung, Lampung mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018. Penilaian tersebut mencakup antara lain penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir. “Kota-kota terkotor itu mendapat nilai jelek karena membuang sampah terbuka serta ada yang belum membuat kebijakan dan strategi nasional tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.”

Kajian Kerentanan Perubahan Iklim Kota Manado

Dokumen laporan kajian kerentanan terhadap perubahan iklim hasil dari kunjungan lapangan, *workshop*, dan masukan dari berbagai *interview*

dengan pemerintah dan *stakeholder* Kota Manado yang dilaksanakan periode 2013 hingga 2014. Indikasinya, sampah dan pengelolaannya di Kota Manado tidak begitu bagus, sehingga menyebabkan tersumbatnya sungai, kanal dan drainase akibat sampah sampai terbawa ke hilir hingga ke laut.

Banyak lokasi di kota belum terlayani fasilitas pengumpulan sampah. Perubahan iklim dan dampaknya akan semakin memperparah kondisi hujan dan suhu yang panas bisa menyebabkan sampah menjadi masalah besar bagi kesehatan masyarakat.

Berapa waktu lalu ada inisiatif usulan masyarakat *riverfront city*, mengusulkan rumah yang membelakangi sungai untuk menghadap sungai. Sekaligus mendorong pemaknaan ulang sungai mengarah kepada upaya pembersihan sungai, pembangunan jalan setapak dan drainase memadai. Berikutnya konsep *waterfront city* dengan merelokasi warga bantaran sungai, yang ‘katanya’ bagi keindahan kota, dan pengendalian sampah.



Seorang siswa SD di Kota Manado, membuang sampah botol plastik ke tempat sampah yang tersedia di jalan Samratulangi Manado. Masyarakat luas tentunya harus terlibat, peduli dan turut serta dalam arah kebijakan kendali sampah yang sudah ditetapkan pemerintah, agar semua pihak boleh melangkah seiring strategi nasional pengelolaan sampah jelang 2025 dan seterusnya. Foto: **manadobacirita**

Sampah

Berdasar data Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, produksi sampah per jiwa per hari mencapai 2,064 meter kubik. Jumlah penduduk sesuai data capil 516.154 jiwa, artinya total produksi sampah adalah 412,9 ton per hari. Dilansir dari Tribun Manado, ada delapan puluh satu dum truk milik Pemkot beroperasi. Sampah yang dapat terangkut dengan fasilitas kendaraan sampah milik Pemkot ke TPA Sumumpo sejumlah 1.680 meter kubik per hari. Sementara jumlah sampah tidak terangkut ke TPA Sumumpo sebesar 384,5 meter kubik per hari. Sampah tak terangkut dikelola di luar TPA, dikelola bank sampah, atau ada juga yang tak terjangkau sebab dibuang sembarangan.

Tahun 2010, Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Lebih dari 3 juta metrik ton sampah plastik yang berasal dari Indonesia

mencemari lautan dunia. Data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Dan sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang kelaut.

Arah Kebijakan Negara

Pada 2018, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 15 %. Untuk lingkungan pesisir dan laut, pada dua tahun silam, pemerintah sudah berkomitmen mengurangi hingga 17 % sampah plastik jangan sampai masuk lingkungan pesisir dan laut.

Apa kabar Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. Kita masih belum menyinggung lebih dalam padahal sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri, misal pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi

sampah dalam suatu waktu, dengan jumlah sampah yang mirip dengan jumlah konsumsi.

Di Indonesia ada Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Ada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Berikutnya ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 jo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Apakah ini akan jadi acuan bagi langkah tindak?

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, menyampaikan, pemerintah kota dan kabupaten diharapkan dapat mendukung target pengelolaan sampah sebesar seratus persen pada tahun 2025. Penyampaian Dirjen PSLB3 KLHK itu dapat dibaca pada artikel 'Kota dan Kabupaten Wujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan' pada situs Kominfo.

Kita belum menyinggung sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Limbah hitam; sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen berbahaya. Limbah rumah tangga: sampah cair dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Sampah ini sangat mungkin mengandung pathogen dan sangat mungkin mengalir ke sungai, danau dan laut.

Padahal sampah dapat berada dalam setiap fase materi: padat, cair, maupun gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Secara nasional diprediksi bahwa volume sampah rumah-tangga dan sejenis sampah rumah-tangga pada 2018 mencapai 66,5 juta ton.

Resolusi Sampah

Revolusi daur ulang, menekan sampah hingga di titik nol. Di negara Skandinavia, selama bertahun-tahun sudah mengubah sampah jadi energi. Mereka mereka harus mengimpor sampah dari Inggris, Italia, Norwegia, dan Irlandia untuk memberi mensuplai 32 pabrik limbah untuk menghasilkan energi. "Sekarang sampah diperlakukan dengan cara berbeda dari sebelumnya. Ini bukan sekedar sisa-sisa,

ini adalah bisnis," ujar Anna-Carin Gripwell, Direktur Komunikasi Manajemen Limbah – Swedia.

Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Selasa, 6 Desember 2017 menerbitkan resolusi untuk fokus pada upaya menghentikan pembuangan sampah plastik dan mikroplastik ke laut. Resolusi ini didukung Menteri Lingkungan dari berbagai negara yang turut serta dalam UN-Environment Summit 2017 di Nairobi, Kenya. Diyakini resolusi itu akan menjadi dasar hukum untuk mencegah masuknya sampah ke laut.

Perwakilan negara-negara yang turut serta dalam UN-Environment Summit sepakat mencegah dan mengurangi polusi laut secara signifikan hingga mencapai target pada 2025. Langkah konkret diambil, dibentuklah kelompok kerja internasional mengkaji opsi-opsi penanganan sampah di laut yang mengikat secara hukum. Tujuan utama kelompok kerja internasional adalah mencari cara menyapkan sampah laut dalam jangka panjang. Diharapkan setiap negara memprioritaskan kebijakan menghindari sampah plastik dan mikroplastik masuk ke lingkungan laut.

Masyarakat luas tentunya harus terlibat, peduli dan turut serta dalam arah kebijakan kendali sampah yang sudah ditetapkan pemerintah, agar semua pihak boleh melangkah seiring strategi nasional pengelolaan sampah jelang 2025 dan seterusnya. Pemerintah sudah menyebut bahwa langkah tindak akan dikerjakan cepat dan terukur, sebagaimana diamanatkan. "Noh ini wakil rakyat dengan pemerintah so sering studi banding di luar negeri, so banyak pengalaman, so ada kebijakan yang harus diimplementasikan. So boleh mulai jo, jangan somo tambah banyak ini sampah tabiar kong beking panyaki, kong beking torang samua malo keei," ujar Yuriko Umboh, warga Sulawesi Utara yang menetap di Singapura.

Semoga setiap lembar kebijakan negara dapat dikerjakan oleh semua pemangku kebijakan, dan semua masyarakat, setiap hari, setiap waktu.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini dapat diakses pada link <https://kelung.com/sampah-dan-revolusi-daur-ulang>



Foto : Poljia AMP/L/amp/lor.id

“PAPA SEHAT” Kontrol Kesehatan Peserta Didik di Sekolah

Oleh **H. ABDUL AZIS**

Sebelum tahun 2009 belum ada sekolah di Kabupaten Takalar yang menganjurkan pola hidup bersih dan sehat bagi anak didiknya.

Sebagai wadah pendidikan, sekolah memang merupakan tempat paling tepat untuk memberikan pengetahuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kepada anak. Apalagi kini sebagian besar anak menghabiskan waktunya di sekolah, baik untuk belajar maupun bermain. Kendati demikian, sangat disayangkan sampai saat ini kesehatan sekolah belum banyak dilirik maupun diperhatikan. Padahal, potensi sekolah untuk mempromosikan kesehatan, termasuk kebersihan sanitasi sangat besar. Melihat kenyataan, bahwa selain berfungsi sebagai tempat pembelajaran, sekolah juga dapat menjadi ancaman penularan penyakit jika tidak dikelola dengan baik. Warga sekolah beranggapan bahwa kebersihan dan kesehatan sekolah hanya dilakukan oleh bujang sekolah dan guru olahraga. Lebih dari itu, usia sekolah bagi anak juga merupakan masa rawan terserang berbagai penyakit.

Belum dilakukannya kebiasaan hidup bersih dan sehat oleh peserta didik di sekolah maupun di rumah, menjadi salah satu penyebab gangguan kesehatan seperti diare, demam berdarah, infeksi saluran pernapasan, dan lainnya. Fasilitas jamban sekolah tidak mencukupi rasio peserta didik, air bersih tidak tersedia, dan berbagai penyakit berbasis lingkungan seperti diare, DBD, ISPA dan peserta didik belum terlibat dalam kegiatan bersih sehat di sekolah. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai PHBS di sekolah merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan melalui pendekatan Usaha Kesehatan Sekolah.

PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan PHBS, dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Lingkungan sekolah selayaknya harus memiliki standar sarana dan prasarana yang dapat mendukung tercapainya PHBS. Pendidikan dan tenaga kependidikan juga perlu memahami PHBS.

Sebelum tahun 2009 tidak satupun sekolah dari 248 SD di Kabupaten Takalar yang menganjurkan pola PHBS terhadap anak didiknya. Pola hidup bersih sehat baru mulai digalakkan di kabupaten ini setelah diluncurkannya program inovatif Papan Kontrol Kesehatan atau PAPA SEHAT.

PAPA SEHAT merupakan penerapan metode pelibatan peserta didik dalam melakukan monitoring secara partisipatif. Uji coba dimulai pada 37 siswa Kelas 6 SDN 81 Kalukubodo Kabupaten Takalar. Mereka diajak berpartisipasi dalam pembuatan Papan

Kontrol Sehat di kelas dengan menggunakan alat sederhana dan bahan bekas.

Seorang Jenderal Sehat dipilih untuk memimpin dan mengajak kawan-kawannya melakukan pola hidup bersih sehat. Untuk menjadi Jenderal Sehat, siswa harus memenuhi kriteria berpenampilan bersih, rapih, dapat memimpin dan memengaruhi temannya untuk melakukan PHBS. Siswa-siswi Kelas 6 sekolah ini juga membentuk kelompok kelompok sehat di kelas yang secara bergilir mengontrol kebersihan diri, teman, kelas, toilet, dan lingkungan sekolah.

Pada tahun 2010, inovasi ini berhasil diterapkan di semua kelas bahkan sampai di tingkat gugus. Inovasi ini berawal dari inisiatif salah seorang guru di SD. Kalukubodo Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar H. Abdul Azis Dg. Rani, di tahun 2009. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan MPA-PHAST dan CLTS, beliau memiliki ide untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih sehat serta berperan dan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat.

Tak hanya dalam hal mempraktikkan, tapi juga mampu mengedukasi dan menginovasi peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah dalam meningkatkan kesehatannya. Caranya dengan mengontrol kesehatan peserta didik dalam bentuk papan kontrol kesehatan yang dibuat secara sederhana. Maka dimulailah pembuatan papan kontrol sehat di sekolah.

Papan kontrol kesehatan berisi beragam kegiatan perilaku bersih dan sehat yang dapat dilakukan peserta didik seperti mandi menggunakan sabun dan shampoo, menggosok gigi, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memotong dan membersihkan kuku, mencukur dan merapikan rambut, membersihkan telinga dan hidung, buang air besar dan kecil di jamban, hanya meminum air yang sudah dimasak, berpakaian bersih dan rapi, membuang sampah pada tempatnya, tidak jajan di sembarang tempat, selalu makan pagi sebelum memulai aktivitas sehari-hari, membimbing dan mengawasi adik kelas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta menyampaikan pesan-pesan perilaku hidup bersih dan sehat kepada keluarga di rumah.

Langkah konkret pun diambil. Visi besarnya adalah menjadikan sekolah sebagai tempat untuk memberdayakan peserta didik agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat melalui papan kontrol kesehatan. Sebab, kawasan sekolah adalah media penyampaian informasi kesehatan yang secara



Foto: JIPP Sulawesi Selatan

tidak langsung bisa dilakukan oleh peserta didik sangat cocok untuk perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, memiliki papan kontrol sehat. Kuncinya adalah papan kontrol kesehatan ini bisa dijadikan alat untuk mengubah perilaku hidup bersih dan kesehatan peserta didik. Tujuannya, untuk mencegah banyaknya penyakit yang bisa menyerang peserta didik, sehingga kesehatannya semakin meningkat.

Agar program Papan Kontrol Sehat ini bisa terlaksana, maka perlu adanya prioritas dukungan dari pihak sekolah. Tujuannya, untuk membiayai para guru dalam membuat papan kontrol sehat. Sebab, tidak mungkin para guru kelas bisa berbuat tanpa adanya dukungan dari pihak sekolah sebagai penentu kebijakan.

Awalnya H. Abdul Azis hanya membuat papan kontrol sehat di Kelas 6, setelah berjalan 1 bulan praktik bersih sehat di kelas, kepala sekolah merespon dan meminta kepada seluruh guru kelas yang lain untuk mereplikasi papan kontrol sehat di kelasnya masing-masing, karena siswa terlibat langsung dalam perilaku bersih dan sehat, seperti kelas bersih, kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan sekolah.

Dengan keberhasilan yang telah dicapai di tingkat gugus, maka Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Takalar menindak lanjuti dalam bentuk program replikasi papan kontrol sehat pada tahun 2011 ke 90 SD dengan jumlah peserta didik 15.405 orang, sasaran dari 248 sekolah dasar

yang ada kabupaten Takalar yang ditandai penandatanganan komitmen bersama antara Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Takalar dengan pihak sekolah yang mewajibkan setiap sekolah mengadakan papan kontrol sehat, membentuk kelompok bersih, memilih Jenderal Sehat, mengintegrasikan perilaku hidup bersih sehat ke dalam mata pelajaran, memilih Dokter Kecil, dan menyiapkan sarana sanitasi.

Pada tahun 2013 direplikasi kepada 152 Sekolah Dasar dengan jumlah peserta didik sebanyak 34.174 orang yang telah paham pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat yang dimulai dari sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakat.

Keberhasilan kegiatan papan kontrol sehat kelas di kabupaten Takalar semakin menarik perhatian dari kabupaten lain seperti Barru, Luwu Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Provinsi Papua di beberapa distrik, yang difasilitasi oleh WISE Consortium (Pemerintah Kabupaten, Dubai Care, CARE, UNICEF, Save The Children).

Penggunaan papan kontrol sehat kelas semakin nampak hasilnya di dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik yang menjadi kegiatan rutinitas di sekolah replikasi.

Penggunaan PAPA SEHAT semakin nampak hasilnya di dalam penerapan PHBS bagi peserta didik dan menjadi kegiatan rutinitas yang dilakukan sampai sekarang.

Tidak berhenti sampai disitu. Kegiatan kontrol sehat di setiap sekolah kelas diawasi oleh seorang



(Kiri) SDN 77 Kanaeng di Desa Bonto Kanang Kabupaten Takalar yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program PAPA SEHAT. (Kanan) Bupati Takalar bersama tim dari Dinas Pendidikan Kab. Takalar berfoto bersama di booth pameran. Inovasi PAPA SEHAT meraih penghargaan dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.

Jendral Sehat yang dilaporkan langsung kepada guru kelasnya masing-masing yang hasilnya direkap dalam laporan mingguan. Selanjutnya guru merekap laporan mingguan untuk diakumulasi dalam bentuk laporan bulanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat peserta didik di sekolah.

Kegiatan kontrol sehat kelas di masing-masing kecamatan dimonitoring dan evaluasi oleh Tim Pokja kabupaten. Dengan berjalannya inovasi PAPA SEHAT lebih dari lima tahun sejak masa rintisan hingga masa pengembangan dan replikasi seperti saat ini, sistem pemantauan menjadi lebih mudah. Sebab, semua kegiatan dalam inovasi PAPA SEHAT dilakukan secara mandiri pada sekolah secara keseluruhan. Namun, Dinas Pendidikan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PAPA SEHAT di masing-masing sekolah.

Evaluasi juga terus dilakukan guna memastikan efektivitas penggunaan PAPA SEHAT dalam meningkatkan taraf kesehatan peserta didik dan

warga sekolah. Dengan evaluasi berlapis tersebut, Dinas Pendidikan juga melakukan pemberdayaan bagi peserta didik, guru dan komite. Tujuannya, menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.


Secara umum, Inovasi PAPA SEHAT telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, warga sekolah, terutama peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dari papan kontrol sehat kelas, karena adanya kegiatan tersebut mereka menjadi sadar akan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan manapun.

Pembelajaran yang diperoleh dari inovasi ini, peserta didik terbangun rasa percaya diri, tanggung jawab, kejujuran, dan menumbuhkan partisipasi aktif. Sikap ini menjadi modal bagi peserta didik untuk menjadi agen perubahan bagi penerapan PHBS di sekolah, rumah, dan masyarakat. Dari kegiatan pembiasaan di sekolah yang dilakukan secara rutin, diharapkan dapat menjadi budaya hidup bersih dan sehat pada peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Inovasi PAPA SEHAT diikutsertakan dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Inovasi ini telah melalui proses seleksi, coaching yang dilakukan tim independen dari GIZ, BaKTI, Kompak, PKP2A LAN, STIA LAN yang dalam prosesnya bekerja sama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Ortala) Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Biro Ortala bertindak sebagai *leading* sektor pelayanan publik yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan inovasi pelayanan untuk diikutsertakan pada kompetisi tingkat nasional melalui SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik).

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Guru SD Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan dapat dihubungi melalui email azisfakhri04@gmail.com



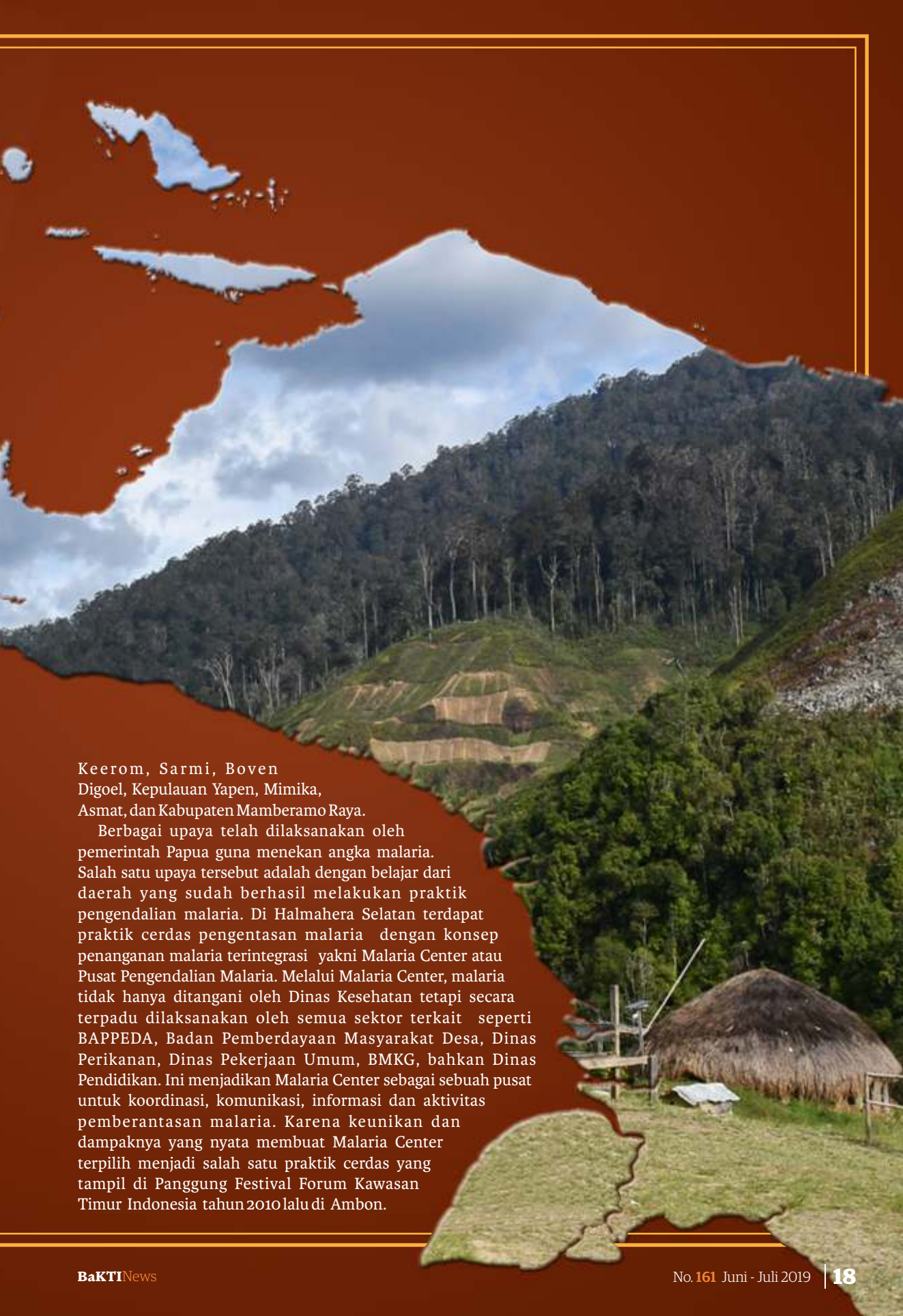
Malaria Center untuk Papua

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Di balik alamnya yang indah dengan hamparan hutan hijau yang menyelimuti permukaan daratan Papua, tantangan Malaria masih membayangi. Papua masih menjadi salah satu daerah endemis Malaria tertinggi di Indonesia selain Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, hal ini terungkap pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait “Situasi Malaria Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017”.

Data angka kejadian malaria di Papua yang ditunjukkan dalam Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2016 yakni 160.143 kasus positif dan 294.644 untuk kasus Malaria yang dikonfirmasi laboratorium. Meski angka kasus positif menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yakni 170.829 namun jumlahnya masih tergolong tinggi.

Hingga saat ini ada delapan kabupaten di Papua yang angka *Annual Parasite Incidence* (API) mencapai 67% yakni Kabupaten Jayapura,



Keerom, Sarmi, Boven
Digoel, Kepulauan Yapen, Mimika,
Asmat, dan Kabupaten Mamberamo Raya.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah Papua guna menekan angka malaria. Salah satu upaya tersebut adalah dengan belajar dari daerah yang sudah berhasil melakukan praktik pengendalian malaria. Di Halmahera Selatan terdapat praktik cerdas pengentasan malaria dengan konsep penanganan malaria terintegrasi yakni Malaria Center atau Pusat Pengendalian Malaria. Melalui Malaria Center, malaria tidak hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan tetapi secara terpadu dilaksanakan oleh semua sektor terkait seperti BAPPEDA, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, BMKG, bahkan Dinas Pendidikan. Ini menjadikan Malaria Center sebagai sebuah pusat untuk koordinasi, komunikasi, informasi dan aktivitas pemberantasan malaria. Karena keunikan dan dampaknya yang nyata membuat Malaria Center terpilih menjadi salah satu praktik cerdas yang tampil di Panggung Festival Forum Kawasan Timur Indonesia tahun 2010 lalu di Ambon.



(1) Kunjungan tim Malaria Center ke rumah warga. (2) Kegiatan Workshop Analisa Situasi Malaria. (3) Tim Gempur Malaria Kabupaten Keerom. (4) Kegiatan pertemuan lintas sektor.

Foto-foto: **Tim Malaria Center**

Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika pada tanggal 5 Desember 2017 berkunjung ke Halmahera Selatan. Keberhasilan pemerintah kabupaten Halmahera Selatan dalam penanggulangan malaria melalui Malaria Centernya, menjadi perhatian Provinsi Papua untuk menjadikan kabupaten Halmahera selatan sebagai daerah *Study Visit* dalam penanggulangan Malaria.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan Tim *Study Visit* dr. Derri Mufari yang juga merupakan Kepala Balai Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, TB dan malaria pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua meyampaikan bahwa, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk belajar lebih jauh tentang pengendalian malaria untuk diterapkan di Papua. Papua adalah daerah dengan angka malaria tertinggi di Indonesia. Di tahun 2018 Dinas Kesehatan telah menetapkan anggaran untuk pembangunan Malaria Center.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan tim Papua ke Halmahera Selatan, pada tanggal 15 Desember 2017, di Jayapura Dr. Mohammad Alhabsyi menjadi pembicara dalam kegiatan Pertemuan koordinasi pembentukan pusat pengendalian malaria yang juga dikenal dengan Malaria Center yang dilaksanakan oleh Pemprov Papua dengan dukungan UNICEF. Dr. Mohammad Alhabsyi

adalah salah satu penggagas Malaria Center dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan.

Saat ini, Pemerintah Papua sedang dalam proses mengembangkan Malaria Center di 8 kabupaten kota dengan angka malaria tertinggi yakni di delapan kabupaten tadi dimana angka API malariannya lebih dari 100 per 1.000 penduduk menurut data sensus malaria Dinas Kesehatan Papua tahun 2017.

Proses pengembangan Malaria Center tersebut juga melibatkan 3 orang staf sekaligus pendiri Malaria Center Halmahera Selatan diantaranya adalah bapak Firmansyah Mustafa. Ketiganya bersama dua orang pendamping lain yang datang dari Jakarta dan Buton, Sulawesi Tenggara bertugas sebagai pendamping yang akan memberikan masukan-masukan dan bantuan teknis lainnya selama satu tahun yang dimulai bulan Juli 2018 hingga juni 2019 nanti.

Untuk Malaria Center di Keerom sendiri sudah mulai dibentuk pada tahun 2018. Peresmian sekretariat dilakukan pada tanggal 22 November 2018 oleh Bupati Keerom Muhammad Markum, SH, MH, MM. Malaria Center ini menjadi wadah koordinasi yang menghimpun seluruh *stakeholder* lintas sektoral pemerintah, swasta dan masyarakat. Pelibatan lintas sektor penting



5

karena terdapat beberapa variabel terkait penularan penyakit malaria selain sektor kesehatan, seperti faktor lingkungan sebagai tempat perindukan nyamuk, variabel perilaku penduduk terkait upaya pencegahan malaria dan lainnya, sehingga intervensi penanggulangan malaria dapat dilakukan secara terpadu.

Berbagai upaya sudah mulai dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom seperti kerjasama dengan Yayasan Gapai Papua, sebuah LSM yang fokus isu kesehatan, dan UNICEF Indonesia melaksanakan kegiatan *Workshop* Analisa Situasi dan Pemetaan Malaria Kab. Keerom, penyuluhan malaria di sekolah-sekolah, kerjasama dengan pihak swasta seperti dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Keerom dengan mendorong dan menyelenggarakan pelatihan kader malaria perusahaan, kegiatan pencegahan dan juga mendorong komitmen perusahaan untuk menyediakan layanan diagnosis dan pengobatan malaria di lingkungan perkebunan. Malaria Center di Keerom aktif bekerja melalui gerakan GEMPUR MALARIA (Gerakan Masyarakat Kampung Berantas Malaria). Gerakan ini diharapkan mendorong masyarakat secara aktif untuk mencegah malaria di lingkungan rumah tangga dan di wilayah kampungnya.

Di kabupaten Mimika, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, LPMK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan

Kamoro), dan *Community Health Development* (CHD) Freeport bekerjasama bahu membahu memberantas Malaria dengan mendirikan Pusat Pengendalian Malaria (Malaria Center) untuk mencapai tujuan Mimika Bebas Malaria 2026. Namun, berdasarkan pengamatan dan analisa Dinkes Papua, masing-masing sektor yang terlibat dalam wadah Mimika Malaria Center tersebut masih berjalan parsial atau sendiri-sendiri, harapannya ke depan bisa lebih aktif penglibatan *multi stakeholdernya* agar lebih banyak pihak yang bersama-sama bekerja menuntaskan malaria di Mimika.

"Jika Maluku Utara saja dengan gugus pulau yang tidak mudah dan geografis yang sulit, tapi bisa melakukan upaya untuk mengeliminasi malaria, seharusnya dapat memacu daerah lain yang memiliki akses lebih mudah dan ini layak untuk diberikan apresiasi dunia" ungkap ibu Nila Moeloek Menteri Kesehatan pada pelaksanaan Jambore Kader Malaria di Maluku Utara pada 2 April 2019.

Melalui pembentukan malaria center ini diharapkan angka kesakitan dan positif malaria bisa diturunkan dalam waktu dekat dan bahkan bisa dihapuskan dari bumi Papua.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Praktik Cerdas Malaria Center dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Meningkatkan Hasil Belajar, KIIAT Guru Diperluas

Oleh **SHARON KANTHY**





Pemerintah menyadari pentingnya pendidikan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena itu, sejak tahun 2009, 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan, setengahnya untuk gaji dan tunjangan guru. Namun demikian peningkatan kesejahteraan guru belum berjalan seiring dengan peningkatan kinerja guru maupun dan hasil belajar murid.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas anggaran pendidikan agar lebih efektif dan berdampak pada hasil belajar murid, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia meluncurkan Program Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru). Program KIAT Guru merupakan program prioritas yang mengaitkan tunjangan dengan kinerja guru melalui verifikasi kehadiran dan penilaian kualitas layanan guru yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat pengguna layanan sekolah. KIAT Guru adalah kegiatan multi-tahun yang dilaksanakan dalam beberapa tahap: Pra-Rintisan (2014-2015), Rintisan Tunjangan Khusus Guru dikaitkan dengan kinerja/kualitas layanan (2016-2018), dan Tahap Perluasan Program Rintisan KIAT Guru (2019).

Hasil monitoring dan dan studi kualitatif KIAT Guru mengidentifikasi sedikitnya terdapat 4 aspek yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi, pemantauan, dan penilaian layanan pendidikan; peningkatan keterlibatan orang tua dalam mengawasi pembelajaran anak; penilaian kinerja guru menggunakan indikator sederhana dan obyektif; dan pembayaran tunjangan khusus guru dilakukan berdasarkan indikator kinerja objektif.

Dimulai dengan hanya 31 sekolah dasar (SD) di tahun 2014 dan berkembang menjadi 203 SD di tahun 2016, KIAT Guru akan diterapkan di 410 SD, dimana 207 diantaranya merupakan sekolah yang baru terlibat dalam tahap perluasan ini.

Hasil evaluasi dampak KIAT Guru menunjukkan adanya dampak positif dari implementasi program KIAT Guru di 5 Kabupaten intervensi, khususnya untuk model Kelompok 2 dimana pembayaran tunjangan khusus guru dikaitkan dengan kehadiran guru dan diverifikasi oleh pemangku kepentingan. Pencapaian hasil belajar murid di kelompok pendekatan ini tiga setengah kali lebih cepat dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tidak menerima intervensi KIAT Guru.



Program Kiat Guru mengatasi keterbatasan pemerintah dalam mengawasi kualitas layanan guru dengan melibatkan penilaian oleh masyarakat.

Sepanjang 2016-2018, Program Rintisan Kiat Guru sendiri mengujicoba tiga model pendekatan, yaitu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta pembayaran tunjangan khusus berbasis kehadiran guru, dan pemberdayaan masyarakat serta pembayaran tunjangan khusus berbasis kualitas layanan guru.

Dalam lokakarya Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) serta pembahasan regulasi perluasan program Kiat Guru di Jakarta Februari yang lalu, Kepala Pokja Kebijakan TNP2K Elan Satriawan menyampaikan bahwa program rintisan Kiat Guru merupakan suatu terobosan dalam memberikan uang negara yang berbasis kinerja, "Program ini mengatasi keterbatasan pemerintah dalam mengawasi kualitas layanan guru dengan melibatkan penilaian oleh masyarakat. Kabupaten peserta Kiat Guru telah mendukung visi terobosan ini, yang ke depannya tidak akan berhenti sebagai uji coba tetapi akan diangkat menjadi program skala nasional," ungkap Elan.

Melihat hasil program rintisan ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK-Kemendikbud) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), bersama dengan pemerintah daerah lima kabupaten rintisan (Ketapang, Landak, Sintang, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur) sepakat untuk memberdayakan masyarakat dan menggunakan kehadiran guru sebagai dasar pembayaran TK bagi guru di 410 SD rintisan Kiat Guru. Kiat Guru Tahap Perluasan ini diharapkan juga dapat mengujicoba mekanisme yang paling memungkinkan untuk perluasan Kiat Guru sebagai kebijakan nasional.

Karenanya, strategi pendampingan masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah akan disesuaikan agar pemangku kepentingan siap melanjutkan kebijakan. Di antara strategi tersebut adalah tahapan pertemuan antara masyarakat dan guru yang diperpendek untuk mencapai janji bersama antara pihak sekolah, orang tua, dan



Kiri : Kepala Pokja Kebijakan, TNP2K, Elan Satriawan, membuka Lokakarya Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen KIAT Guru di Jakarta, 20 Februari 2019.

Kanan : Dalam rangka perluasan kebijakan KIAT Guru, TNP2K dan lima kabupaten rintisan melaksanakan Lokakarya Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Jakarta 21-22 Februari 2019.

Foto-foto : **Abdurrahman Doge/TNP2K**

masyarakat desa dalam meningkatkan capaian pendidikan.

Pemerintah daerah pun turun tangan dalam memilih 207 SD KIAT Guru Tahap Perluasan. Melalui Lokakarya Pembahasan Regulasi Perluasan Program Kebijakan KIAT Guru, 44 peserta yang terdiri dari perwakilan Tim Koordinasi Daerah di lima kabupaten rintisan, difasilitasi oleh tim TNP2K, menetapkan daftar SD calon penerima intervensi.

Untuk mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses penilaian dan pelaporan terhadap layanan bulanan guru dari desa ke kabupaten, instrumen penerapan mekanisme KIAT Guru juga akan lebih banyak memanfaatkan sarana teknologi.

Perwakilan sekolah, pengawas, masyarakat, pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten, selaku pengguna utama aplikasi KIAT Guru, membahas penambahan fitur teknologi pengenalan wajah (*face recognition*) di KIAT Kamera. Fitur ini akan aktif saat KIAT Kamera

merekam foto guru sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Dengan tetap melibatkan masyarakat, jam masuk dan jam pulang guru yang tercatat di KIAT Kamera akan diverifikasi oleh Kelompok Pengguna Layanan sebelum dijadikan dasar pembayaran tunjangan khusus guru.

Penilaian dan pelaporan layanan guru rencananya juga akan dilakukan secara digital. Guru dan masyarakat dapat mengisi nilai layanan guru ke dalam aplikasi KIAT Nilai Sekolah dan mengirimnya ke Dinas Pendidikan melalui jaringan internet, saat tersedia.

Dalam memantau perkembangan belajar murid setiap semester, Tes Cepat akan disediakan dalam bentuk aplikasi ponsel agar masyarakat bisa secara mudah menilai kemampuan dasar literasi dan numerasi anak mereka secara berkala.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program KIAT Guru dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Oleh **PETRUS SUPARDI**

Guru Felix Karubaba Mendidik Anak-anak Asmat dengan Kasih

“ Untuk mendidik anak-anak Asmat harus ada pendekatan dan bimbingan khusus. Saya menerapkan pendekatan kasih. Saya harus bersedia melepaskan ego dan harga diri saya serta bersedia mendengarkan dan melayani mereka. Kalau mereka tidak masuk sekolah, saya cari ke rumah. Di sana, saya cerita dengan orang tua mereka. Kalau ada yang sakit, kami bawa ke Rumah Sakit.

Felix Karubaba
Kepala SD YPPGI Agats

Cuaca di kota Agats cerah. Anak-anak Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Agats mengenakan pakaian seragam olahraga. Mereka bermain bola di lapangan yang berada di halaman sekolah. Sebagian lainnya, sedang mengikuti pelajaran di dalam kelas. Pada saat istirahat, para siswa berlarian ke kantin sekolah. Mereka membeli kue dan minuman yang tersedia di kantin. Sebagian lainnya, pergi ke perpustakaan untuk membaca buku.

Kini, kondisi SD YPPGI Agats tertata rapi. Halaman sekolah bersih. Gedung sekolah dicat warna biru. Beberapa pohon tumbuh di sekitar gedung sekolah. Suasana sekolah tampak sejuk.

Di sebelah barat, tepatnya di area parkir terdapat gedung perpustakaan. Sebelumnya, perpustakaan hanya menjadi ruang menyimpan barang rongsokan. Buku-buku berserakan di lemari. Tetapi, saat ini perpustakaan menjadi ruang yang menyenangkan bagi anak-anak. Mereka datang ke perpustakaan dan mencari buku kesukaannya serta duduk membaca dengan tenang. Mereka dapat membaca ratusan judul buku yang tertata rapi di rak-rak perpustakaan.

Toilet siswa dan guru tertata rapi di sebelah utara. Kondisi toilet bersih. Tidak ada bau menyengat. Anak-anak dapat menggunakan toilet tanpa antri karena terdapat 5 toilet di sekolah. Di depan pintu masuk sudah terpampang tulisan, Toilet Putri dan Toilet Putra.

Perbaikan Tata Kelola Sekolah

“Sejak 23 Maret 2015, saya dilantik menjadi Kepala SD YPPGI Agats oleh Bupati Yuvensius Biakai. Kemudian, pada 14 November 2017, saya dilantik kembali oleh Bupati Elisa Kambu. Saya dan para guru berusaha pelan-pelan membenahi sekolah ini supaya menjadi lebih baik sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik,” tutur Felix Karubaba, putra Serui kelahiran Merauke 1965 ini.

Felix menuturkan pada awal dirinya menjadi kepala sekolah, ia mengajak para guru untuk melakukan rapat dan membahas program kerja sekolah. “Sebagai pimpinan, saya selalu mengedepankan musyawarah. Kami bicara tentang kemajuan siswa. Kami juga bicara tentang pengembangan sekolah,” tutur pria yang menyelesaikan pendidikan gurunya di SPG Yos Sudarso Merauke, tahun 1987 ini.

Sejak dirinya menjadi kepala sekolah SD YPPGI Agats sampai dengan saat ini, terjadi penambahan

tiga ruang kelas, toilet siswa, kantin dan taman kelas. Di samping membenahi sarana infrastruktur SD YPPGI Agats, Felix juga berupaya memotivasi guru supaya mendidik anak-anak dengan kasih. Meskipun secara fisik SD YPPGI Agats mulai berbenah, tetapi dokumen-dokumen terkait akreditasi sekolah masih minim.

Di tengah kekhawatiran beliau menyongsong akreditasi, Felix bersyukur LANDASAN Papua masuk ke Asmat. “Waktu LANDASAN melaksanakan pelatihan Standar Pelayanan Minimal dan Manajemen Berbasis Sekolah (SPM dan MBS) pada bulan Mei 2017, saya senang sekali. Karena melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan LANDASAN, kami dapat mempersiapkan dokumen-dokumen terkait akreditasi. Hasilnya, kami dapat akreditasi B, sebelumnya akreditasi C,” tutur Felix dengan raut wajah bangga.

Felix dan para guru tetap berjuang supaya SD YPPGI Agats harus terakreditasi A. “Kami akan terus melakukan perbaikan, baik sarana fisik maupun dokumen-dokumen sekolah supaya bisa terakreditasi A,” harapnya.

Terkait kurikulum, ia menjelaskan bahwa saat ini, SD YPPGI Agats telah menerapkan kurikulum tahun 2013. Ia menambahkan bahwa penerapan K-13 di SD YPPGI Agats akan mengalami tantangan karena para siswa harus pro-aktif mengerjakan tugas-tugas. Kondisi ini, akan berpengaruh pada waktu anak di rumah. Tetapi, perlu perhatian serius dari orang tua terhadap tugas-tugas sekolah yang harus dikerjakan oleh anak-anak.

Felix memiliki motivasi kuat memperbaiki SD YPPGI Agats. Beliau bertekad supaya sekolah yang terletak di pusat Kota Agats ini memberikan layanan pendidikan dasar berkualitas bagi para murid. Karena itu, ia selalu berupaya membenahi SD YPPGI Agats, baik dari sisi sarana prasarana maupun dokumen sekolah.

“Saya termotivasi melakukan perbaikan dan pembenahan SD YPPGI Agats ini supaya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan dasar berkualitas. Sarana fisik kita lengkapi. Dokumen-dokumen sekolah kita siapkan. Demikian halnya, para guru kita dorong supaya mengajar dengan baik,” tutur Guru Felix.

Mendidik Anak-anak Asmat dengan Kasih

SD YPPGI Agats memiliki 456 siswa terbagi dalam 15 rombongan belajar. Kelas 1A-D (4 rombongan belajar). Kelas 2A-C (3 rombongan belajar). Kelas 3A-B. Kelas 4A-B. Kelas 5A-B dan kelas 6A-B. Mengingat jumlah ruang kelas sampai



Foto : Petrus Supardi/Yayasan BaKTI

saat ini masih tiga belas ruang sehingga sebagian siswa masuk pada siang hari.

Sebagian besar siswa SD YPPGI Agats adalah orang non-Papua. “Di sekolah ini, banyak anak-anak pegawai. Mereka orang pendatang. Sedangkan anak-anak Papua, terutama yang dari Asmat sedikit. Meskipun anak-anak Asmat sedikit, kami memberikan perhatian serius kepada mereka,” tutur Felix.

Felix mengisahkan sewaktu dirinya masih menjadi guru kelas, ia selalu mencari anak-anak Asmat yang tidak masuk sekolah. Ia pergi ke rumah-rumah siswanya. Di sana, ia bertemu dengan para orang tua siswa dan memberikan motivasi agar orang tua mendorong anak-anak supaya rajin ke sekolah.

Selain memperhatikan kehadiran siswa di sekolah, Felix juga menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Ia melarang keras anak-anak agar tidak makan pinang dan merokok. “Saya sudah tegaskan bahwa anak-anak tidak boleh makan pinang dan isap rokok. Tetapi, sekali lagi, semua kembali ke keluarga. Anak-anak di sekolah hanya sampai jam 12.00, selebihnya mereka tinggal dengan orang tua di rumah. Karena itu, orang tua harus memperhatikan anak-anak supaya tidak makan pinang dan merokok,” tutur Felix.

Berjuang Melawan Arus

Berbagai pembenahan yang dilakukan guru Felix telah mengubah wajah SD YPPGI Agats menjadi lebih cerah. Kini, anak-anak dapat mengakses pendidikan dasar lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Meskipun demikian, Felix harus menghadapi dan melewati tantangan dalam membenahi SD YPPGI Agats di masa depan.

“Saya harus loyal kepada Dinas Pendidikan karena saya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan di sekolah yayasan. Tetapi, saya juga harus mengikuti amanat dari yayasan. Saya tidak bisa membenahi sekolah ini, tanpa berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan yayasan,” tutur Felix.

Terkait perbaikan pendidikan dasar di Kabupaten Asmat, Felix mengibaratkan perjalanan pendidikan di Asmat, termasuk di SD YPPGI Agats harus bisa melawan arus. Selama ini, pendidikan dasar di Asmat berjalan apa adanya. Ke depan, harus ada perbaikan-perbaikan supaya anak-anak Asmat bisa mendapatkan pendidikan berkualitas.

Ia juga menjelaskan menjadi guru di Asmat memiliki tantangan tersendiri. Orang tua belum melihat pendidikan anak-anak sebagai aset masa depan keluarga. Orang tua masih membawa anak-anak ke kampung atau dusun.



Foto : Petrus Supardi/Yayasan BaKTI

Guru Felix Karubaba berfoto bersama dengan Bapak Septer Manufandu, Spesialis Pengembangan Masyarakat Program KOMPAK LANDASAN II.

Selain itu, anak-anak yang orang tuanya pegawai hanya menitipkan anak-anaknya saja. Kalau ada rapat mereka tidak hadir. Mereka mengirim perwakilan orang tua.

Selain tantangan dari luar, Felix juga harus menghadapi karakter setiap gurunya. “Saya harus berupaya memahami karakter dua puluh tiga orang guru di sekolah ini. Saya harus memastikan mereka mengajar dengan baik sehingga anak-anak bisa menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru.”

Ia selalu menekankan pentingnya memberikan perhatian dan sentuhan khusus kepada anak-anak Asmat. Sebab, mereka biasa ketinggalan pelajaran akibat mengikuti orang tua ke kampung. “Anak-anak Asmat harus mendapat perhatian khusus. Biar mereka kelas kecil (kelas 1-3), jarang masuk sekolah, tetapi pada saat mereka masuk, kita beri semangat. Kita beri motivasi dan dukungan. Pada saat kelas besar (kelas 4-6), biasa mereka sudah rajin masuk sekolah,” tuturnya.

Meskipun membenahi SD YPPGI Agats bagaikan melawan arus sungai Asuwets yang deras,

Felix tidak gentar. Dirinya bersama para guru telah menabuh tifa perbaikan di SD YPPGI Agats. perbaikan demi perbaikan telah, sedang dan akan selalu dilakukan demi masa depan anak-anak Asmat.

Felix tidak berjalan sendirian bersama para guru. Ia berharap orang tua, dinas pendidikan dan yayasan terlibat penuh dalam seluruh perbaikan tata kelola di SD YPPGI Agats. Ia juga berharap LANDASAN Papua tetap mendampingi SD YPPGI Agats supaya perbaikan tata kelola sekolah, terutama dokumen-dokumen sekolah lebih lengkap sehingga bisa terakreditasi A.

INFORMASI LEBIH LANJUT

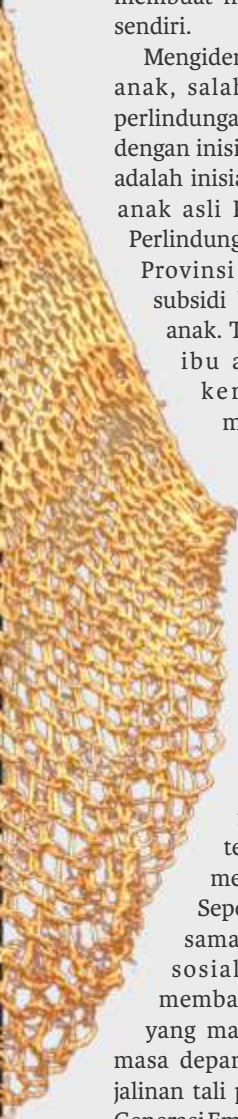
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK LANDASAN II dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Menjalin Noken untuk Generasi Emas Papua

Oleh **LUNA VIDYA MATULESSY**



Mari mulai dari Noken. Noken itu tas. Tas multifungsi. Sebelumnya hanya dibuat dengan tali yang berasal dari kulit pohon, terutama kulit Pohon Ganemo (Melinjo). Tapi saat ini, noken banyak dibuat dengan memakai benang sintetis atau katun. Multifungsi, karena noken digunakan untuk banyak keperluan. Mulai dari aksesoris untuk pesta dan pertemuan raya, sebagai wadah untuk membawa hasil kebun sampai menjadi buaian yang hangat untuk bayi.



Noken identik dengan Papua. Unik dan khas. Noken itu narasi tentang ibu, mama, khas Papua, yang melindungi anaknya. Noken itu bicara jalinan yang berasal dari benang tunggal. Noken juga elastis. Elastisitas ini tidak datang dari materi yang digunakan untuk membuat noken, tapi karena teknik jalinan itu sendiri.

Mengidentifikasi noken dengan ibu dan buaian anak, salah satunya sebagai narasi tentang perlindungan yang melekat pada ibu, begitu juga dengan inisiatif BANGGA Papua. BANGGA Papua adalah inisiatif perlindungan sosial untuk setiap anak asli Papua berusia 4 tahun ke bawah.

Perlindungan sosial ini dikerjakan Pemerintah Provinsi Papua dengan cara memberikan subsidi kepada ibu atau wali yang sah dari anak. Tujuan pemberian subsidi itu, supaya ibu atau wali yang sah mempunyai kemampuan tambahan memberi makanan bergizi kepada anaknya atau hal-hal lain terkait pemenuhan kebutuhan anak untuk tumbuh kembang yang prima, termasuk mempunyai kemampuan tambahan untuk mengakses layanan kesehatan bagi anaknya, mengingat fakta mahal biaya keterpencilan kampung di Papua.

Mengidentifikasi noken pada BANGGA Papua selain sebagai gagasan pemeliharaan ibu pada anaknya, pemerintah pada rakyatnya, noken juga adalah narasi tentang kerjasama yang berkembang, meluas berdasarkan tujuan yang sama. Seperti noken dijalin dari benang tunggal, sama dengan tujuan dari perlindungan sosial BANGGA Papua ini. Satu saja: membangun Generasi Emas untuk Papua yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan di masa depan. Dengan satu tujuan itu, seperti jalinan tali pada noken, setiap pihak dalam Visi Generasi Emas Papua terjalin, terlibat.

Dari “Sosialisasi” ke “Pahami-sasi”

Peningkatan kapasitas komunikasi merupakan salah satu dari beberapa elemen penting pembelajaran dari proses implementasi BANGGA Papua di tiga kabupaten pelaksana saat ini, yaitu Kabupaten Lanny Jaya, Paniai dan Asmat. Merujuk pada pembelajaran itu, sebuah ToT (*Training of Trainers*) kembali dilaksanakan di Jayapura pada awal Mei 2019. Jika sebelumnya peningkatan

kapasitas komunikasi ini diberikan pada anggota Sekber BANGGA Papua provinsi dan kabupaten pelaksana, kali ini ToT Komunikasi menjadi cara memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan BANGGA Papua di tingkat provinsi.

Kegiatan dua hari (2-3 Mei) yang diampu oleh Feby Siahaan, diikuti oleh 26 peserta. Para peserta ToT, mewakili lembaga-lembaga yang belum terlibat dalam struktur formal dan elemen fungsional Sekber BANGGA Papua: TP-PKK, Biro Humas Setda Provinsi Papua, Diskominfo dan Bank Papua.

Dalam prosesnya, peserta ToT diberi ruang untuk merespon informasi mengenai mengapa BANGGA Papua bukan sekedar inisiatif inovatif pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Informasi itu antara lain tentang potensi kekayaan sumber daya alam Papua yang telah dan akan memotivasi banyak pihak menengok ke Tanah Papua.

Fakta “surga kecil yang jatuh ke bumi” bersanding dengan fakta kematian anak baik karena HIV maupun kekurangan gizi, serta ketidakmampuan mengakses layanan publik seperti Puskesmas dan sekolah karena tingginya biaya keterpencilan. Tambahan pula ancaman *stunting* (kekerdilan, gangguan pertumbuhan karena kekurangan gizi yang kronis). Dengan demikian, bahaya laten terhadap visi Generasi Emas Papua dikhawatirkan sumber daya manusia tidak mampu berkompetisi dalam persaingan global karena kekurangan gizi.

Bagaimana sebaiknya menyikapi fakta-fakta tersebut?

Ruang untuk merespon fakta-fakta itulah yang menjadi keunikan ToT Komunikasi ini. Dalam proses merespon fakta-fakta tersebut, peserta dibekali dengan keterampilan bagaimana mengomunikasikan sebuah gagasan secara efektif sehingga mampu meyakinkan orang atau pihak lain untuk mengambil sikap dan bertindak, berpartisipasi secara sinergis dalam upaya mewujudkan gagasan itu. “Komunikasi yang efektif, memersuasi pihak lain,” telah menjadi *tag-line* ToT Komunikasi sejak awal.

Dalam ToT ini, peserta bukan hanya diberi pengetahuan, tapi juga berkesempatan mengujicoba teori di dalam praktik dan latihan. Peserta ditantang untuk menemukan tujuan dan peran yang dapat dimainkan untuk mendukung pencapaian tujuan bersama itu. Peserta diajak untuk berpikir keluar dari cara-cara sosialisasi yang baku dan normatif. Sebagai konsekuensinya,



peserta sendiri harus paham betul tentang BANGGA Papua dan meyakini benar-benar, bahwa program ini memang mampu memajukan orang asli Papua.

Proses di dalam ToT ini melampaui sekedar belajar bersama. Dalam prosesnya, lahir kesepakatan informal untuk melakukan kerja komunikasi yang lebih dari sekedar sosialisasi. Peserta bersepakat untuk bertransformasi dari kerja komunikasi yang hanya sekedar memberi informasi dan centang daftar tugas: 'Ok, sosialisasi selesai dilakukan,' menuju pada tingkat yang lebih tinggi yaitu 'pahami-sasi.' Pada tingkat 'pahami-sasi' ini, peserta harus mampu mengomunikasikan suatu gagasan secara jelas, hingga dapat memengaruhi pihak lain untuk ikut bertindak dan mengeksplorasi, apa peran yang dapat mereka lakukan untuk ikut mewujudkan gagasan tersebut.

Menemukan Tujuan Bersama

Karena ToT ini dihadirkan sebagai afirmasi kepada hasil pembelajaran sepanjang implementasi BANGGA Papua, ToT ini juga menghasilkan pembelajarannya sendiri. Peserta pelatihan memetakan potensi kontribusi untuk ikut menyukseskan sosialisasi (baca:pahamisasi) BANGGA Papua. Tentu, peta peran dan aktivitas ini disesuaikan dengan tupoksi masing-masing peserta.

Cukup banyak potensi kolaborasi yang dapat dilakukan. TP-PKK, misalnya, berjanji untuk bicara tentang BANGGA Papua dalam rapat

koordinasi (rakor) mereka yang berlangsung di Wamena. Selain itu, TP-PKK akan menyertakan substansi BANGGA Papua dalam beberapa kegiatan rutin mereka. Humas menyerukan kerjasama melalui media cetak, media elektronik dan media sosial yang mereka kelola. Sementara Diskominfo menyampaikan peluang untuk memanfaatkan laman situs web yang telah tersedia, untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program BANGGA Papua. Bank Papua pun tidak mau ketinggalan. Selain akan memastikan bahwa stafnya paham tentang BANGGA Papua melalui *in-house training*, Bank Papua menyepakati bahwa penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menabung dan menggunakan jasa perbankan. Terutama karena elemen transfer dan pembukaan rekening atas nama ibu lewat Bank Papua adalah elemen baru dalam program bantuan tunai di Provinsi Papua. Selain BANGGA Papua, tidak ada inisiatif pemerintah lainnya yang menggunakan mekanisme perbankan ini.

Keterkaitan Noken dengan Seluruh Proses

Begini, kulit kayu yang digunakan untuk membuat noken, harus digiling, untuk bisa menjadi tali. Seperti kumpulan kapas dipintal menjadi seuntai benang. Proses identifikasi peran seperti yang terjadi dalam ToT Komunikasi ini, seumpama proses menggiling serat kulit pohon menjadi benang pada proses pembuatan noken. Seperti noken dijalin, dalam prosesnya ToT ini telah mencairkan keberagaman tupoksi setiap



Kiri : Tujuan dari perlindungan sosial BANGGA Papua adalah membangun Generasi Emas untuk Papua yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan di masa depan.

Kanan : Para peserta ToT, mewakili lembaga-lembaga yang belum terlibat dalam struktur formal dan elemen fungsional Sekber BANGGA Papua yaitu TP-PKK, Biro Humas Setda Provinsi Papua, Diskominfo dan Bank Papua sedang mendengarkan penjelasan dari narasumber.
Foto-foto: **Syaifullah/Yayasan BaKTI**

lembaga. ToT ini bukan saja membuat perbedaan lembaga 'digiling' dalam tujuan yang sama, tapi juga telah membangun cara pandang bersama terhadap pentingnya kehadiran dan menghadirkan BANGGA Papua untuk pencapaian visi Generasi Emas Papua ke tengah-tengah masyarakat.

Setiap pihak berbagi fasilitas dan keunggulan *platform* yang selama ini telah dimiliki. Berbagi kekuatan yang potensial dijalin dalam kerjasama mempersiapkan dan meraih visi Generasi Emas Papua. Noken kemitraan belum selesai.

Bahkan mungkin baru pada tahap mulai giling. Seperti noken elastis, demikian juga sifat kemitraan ini. Setiap kait, setiap jalin akan membangun kaitan dan jalinan kerjasama yang lain. Terus meluas, tidak kaku, secara formal mau pun informal, melibatkan setiap orang, memanfaatkan semua peluang, sampai Papua menimang generasi emasnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua, dapat menghubungi info@bakti.or.id

BANGGA Papua adalah program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak orang asli Papua, dengan memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus). Melalui BANGGA Papua, Pemprov Papua sedang membangun generasi emas Papua. BANGGA Papua menyediakan dana bagi anak orang asli Papua yang berusia di bawah 4 tahun, untuk digunakan membeli atau menyediakan kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Dana diberikan langsung kepada ibu dan ditransfer melalui rekening miliknya. BaKTI menerima mandat untuk mendukung komunikasi strategis BANGGA Papua, khususnya meningkatkan kapasitas komunikasi pelaksana program di provinsi dan kabupaten.

Menuju Pohuwato Bebas Sampah Plastik

Oleh **CITRA AYU MENTARI AL RASYID**
dan **AMSURYA WARMAN AMSA**

Permasalahan sampah, terutama plastik memang menjadi masalah global dan melibatkan semua pihak tinggal bagaimana kita mengubah masalah menjadi peluang, limbah menjadi uang.

Marisa 10 April 2019. Bupati Syarif Mbuinga menyampaikan bahwa persoalan limbah sampah plastik merupakan persoalan serius tidak hanya di tingkat global tapi juga dialami oleh Kabupaten Pohuwato. Menurut Bupati Pohuwato persoalan sampah plastik sama pentingnya dengan persoalan perubahan iklim global. Maka dari itu bupati menyarankan agar masyarakat lebih memperhatikan lagi kebersihan lingkungan di sekitar mereka terlebih lagi kepada ibu-ibu petugas kebersihan di sekitar Kota Marisa. Pada kesempatan ini juga Bupati berkesempatan menyaksikan uji coba proses daur ulang plastik serta hasil daur ulang tersebut yang disebut dengan biji plastik.

Dari volume sampah terus meningkat dan akumulatif seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Diperkirakan jumlah sampah yang kita hasilkan sebesar 0,8 kilogram per orang per hari. Lebih dari 20.000 botol plastik terjual per detik, pada tahun 2016 terhitung 480 milyar botol plastik terjual atau 1 juta botol per menit. Sehingga botol





Foto: Burung Indonesia

Bupati Kabupaten Pohuwato, Syarif Mbuinga memperlihatkan wadah air minum hasil daur ulang sampah plastik yang diberikan oleh Marahalim Siagian dari Burung Indonesia. Pada kesempatan ini juga Bupati berkesempatan menyaksikan uji coba proses daur ulang plastik serta hasil dari pada daur ulang tersebut yang di sebut dengan biji plastik.

plastik menjadi kontributor pencemaran lingkungan. Penggunaan plastik telah meningkat sebesar 20 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. ungkap Marahalim Siagian dari Burung Indonesia. Saat ini baru 5 persen yang dari sampah plastik yang didaur ulang secara efektif. Permasalahan sampah terutama plastik memang menjadi masalah global dan melibatkan semua pihak tinggal bagaimana kita merubah masalah menjadi peluang, limbah menjadi uang, lanjut Marahalim.

Harga plastik saat ini 2.500 per kilogram. dan bisa dilakukan sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang, mengumpulkan sampah plastik sebanyak 20 kilogram mungkin tidak sulit karena saat ini banyak plastik yang tercecer, di jalan, pekarangan, sekolah, kantor atau pas ada perayaan pesta. Mengumpulkan plastik bisa juga dilakukan dengan cara membuat bank

sampah plastik. "Ibu-ibu bisa membawa plastik ke bank sampah plastik untuk ditimbang dan diganti dengan uang atau sembako", ungkap Bahari Gobel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pohuwato.

Burung Indonesia sangat *concern* dengan permasalahan limbah plastik karena berdampak langsung kepada lingkungan dan kehidupan satwa seperti ikan dan burung laut. Tidak sedikit sampah plastik di laut dikonsumsi oleh hewan-hewan tersebut karena baik bau maupun visual dari sampah tersebut hampir mirip dengan makanan hal ini disebabkan oleh tumbuhnya mikroba yang biasa disebut sebagai '*Plastisphere*' yang merubah bau dan menutupi sampah plastik tersebut. Pada umumnya burung laut merupakan jenis predator yang memakan apa saja yang terlihat oleh mereka hal ini membuat mereka tumbuh dan berkembang pesat akan tetapi dengan adanya sampah plastik



Foto: Burung Indonesia

Bupati Kabupaten Pohuwato menyaksikan uji coba proses daur ulang plastik. Bupati menandai daur ulang limbah plastik sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mengatasi masalah limbah plastik.

mereka salah mengira plastik tersebut sebagai makanan dan induk burung memberikan sampah plastik kepada anaknya hal ini mengakibatkan banyaknya burung laut yang mati karena kekurangan nutrisi. Hal ini dikemukakan oleh Amsurya Warman Program Manager Burung Indonesia.

Dalam kesempatan ini juga Burung Indonesia mengangkat tema “Pohuwato Bebas Sampah Plastik” dengan menghimbau penggunaan *tumbler* (botol minum) sebagai alternatif yang dapat menghemat plastik dibandingkan dengan menggunakan air minum kemasan dalam setiap kesempatan maupun acara.

Burung Indonesia juga mengampanyekan penggunaan *tote bag* alih-alih kantong plastik. kedepannya Burung Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato mulai menerapkan budaya hemat plastik untuk mencapai tujuan yaitu Pohuwato bebas sampah plastik. Hal ini disimbolisasikan dengan penyerahan wadah air minum dan *tote bag* kepada Bupati Kabupaten Pohuwato.

Kegiatan ini bertempat di UPST Kota Madani Desa Teratai, Burung Indonesia yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato mengadakan *launching* pengolahan daur ulang limbah plastik oleh Bupati Kabupaten Pohuwato yang dirangkaikan dengan silaturahmi sekaligus pembinaan petugas kebersihan dalam rangka menyongsong Adipura 2019. Bupati menandai daur ulang limbah plastik sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mengatasi masalah limbah plastik.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Burung Indonesia dapat menghubungi Citra Ayu Mentari Al Rasyid (Communication and Resource Mobilization Officer) melalui email r.citra@burung.org

Memperkuat Perempuan di Komunitas

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Kelompok Konstituen disingkat KK adalah organisasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, yang dibentuk Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI. Pembentukan Kelompok Konstituen dimulai tahun 2014 untuk empat wilayah yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kota Ambon (Maluku), dan Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan). Tahun 2015 pembentukan Kelompok Konstituen dilanjutkan di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Maros, Kota Parepare (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur).

Pembentukan Kelompok Konstituen dilatari oleh hasil studi yang menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat yang telah memberikan suaranya dalam Pemilihan umum (Pemilu), tidak mengenal wakilnya, baik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi dan kabupaten/kota (Palulungan, 2013; 2017). Sebagian besar masyarakat juga tidak mengenal perempuan anggota DPRD disebut Anggota Parlemen Perempuan (APP) yang merupakan wakil rakyat yang terdekat.



Perempuan yang duduk di DPRD diharapkan mengubah wajah DPRD terutama untuk mendukung dan mengusulkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin dan responsif gender. Untuk dapat mengusulkan kebijakan, anggota DPRD dapat memperoleh masukan dan aspirasi dari konstituennya. Tentu, hanya konstituen berdaya yang dapat menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPRD.

Konstituen berdaya juga tidak terjadi dengan sendirinya. Konstituen adalah masyarakat yang sangat heterogen dengan tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Sementara anggota DPRD adalah mereka yang mewakili konstituen, namun mempunyai posisi dan menjadi kelas sosial elit di dalam masyarakat. Untuk itu, konstituen tidak selalu mudah menyampaikan aspirasi dan kepentingannya kepada wakilnya di DPRD.

Mengapa Kelompok

Anggota DPR dan DPRD yang duduk di posisinya untuk mewakili kelompok masyarakat di daerah pemilihan tempat masing-masing anggota mencalonkan diri. Kelompok masyarakat ini biasanya disebut konstituen, yaitu seluruh warga yang ada di daerah pemilihan tempat seorang anggota dewan dipilih saat pemilihan umum. Pendukung atau warga yang memilih seorang anggota dewan saat pemilu adalah konstituen utamanya. Namun demikian, setelah Pemilu usai, warga lain yang bukan pendukungnya namun berada di daerah pemilihannya tidak bisa diabaikan. Konstituen seorang anggota dewan adalah seluruh warga masyarakat yang tinggal di daerah pemilihannya.

Konstituen adalah mereka yang mempunyai kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi yang diharapkan dijematani oleh wakilnya di DPR dan DPRD. Agar aspirasi konstituen dapat diperjuangkan oleh wakilnya, beberapa mekanisme dapat ditempuh, baik oleh konstituen maupun anggota DPR/DPRD.

Konstituen, secara sendiri-sendiri atau berkelompok menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPR/DPRD secara langsung (tatap muka) atau pun tidak langsung (melalui surat, telepon). Sementara secara kelembagaan, DPR/DPRD mempunyai mekanisme untuk menyerap aspirasi konstituennya.

Reses atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota DPR dan DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun

secara berkelompok. Reses merupakan mekanisme yang memungkinkan anggota DPR/DPRD bertemu langsung dengan konstituen, mendengar, dan menerima langsung aspirasinya.

Anggota DPR/DPRD mengunjungi orang perorang konstituennya, atau dalam bentuk pertemuan tatap muka yang dihadiri perwakilan dari berbagai unsur di dalam masyarakat. Anggota DPR/DPRD menerima aspirasi dari masyarakat yang kemudian diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia untuk menjadi program dan kebijakan.

Tidak semua usulan dan aspirasi dari konstituen berubah menjadi program dan kebijakan. Hanya usulan tertentu dan dari individu atau kelompok tertentu yang berwujud dan dirasakan manfaatnya oleh konstituen. Biasanya usulan yang berwujud berasal dari pihak-pihak yang mempunyai pengaruh dan kekuatan, seperti tokoh masyarakat, pemerintah setempat, atau kelompok-kelompok di masyarakat.

Usulan dan aspirasi yang mewujud dalam bentuk program atau kebijakan tidak selalu merupakan kebutuhan mayoritas Konstituen. Jika pun ada konstituen yang memperoleh atau mengakses program pemerintah, bukan karena konstituen tersebut mempunyai wakil di DPR/DPRD, akan tetapi karena program tersebut adalah ditujukan kepada individu atau kelompok bersangkutan.

Sebagian konstituen tidak mempunyai akses dengan wakilnya, terutama konstituen yang terdiri dari orang-orang miskin, perempuan, anak, dan kelompok minoritas. Mereka tidak terwakili dan tidak mempunyai wakil di dalam organisasi atau lembaga di masyarakat, sehingga aspirasi mereka tidak tersampaikan. Jika pun mereka berada di dalam organisasi tertentu di masyarakat, kuantitas dan kapasitas mereka tidak mumpuni untuk bersuara dan memengaruhi pengambilan keputusan.

Di dalam masyarakat, kelompok tidak hanya mempunyai kekuatan dalam memengaruhi pengambilan keputusan, tetapi memudahkan pengorganisasian dan pengalokasian sumber daya. Sementara itu, sebagian besar kelompok atau organisasi di dalam masyarakat umumnya beranggotakan laki-laki dan tokoh masyarakat. Sedikit sekali individu-individu yang dikategorikan sebagai orang-orang marjinal, seperti perempuan, perempuan miskin, dan kelompok minoritas yang bergabung di dalam organisasi atau kelompok.

Karenanya pengorganisasian atau pengelompokan perempuan dan perempuan miskin menjadi penting dan strategis. Perempuan dan perempuan miskin tidak mempunyai ruang dan kesempatan yang cukup untuk mengakses layanan yang disediakan negara. Demikian juga dalam pembentukan kebijakan, perempuan dan perempuan miskin tidak mempunyai ruang dan kekuatan untuk memengaruhinya.

Pembentukan kelompok khusus perempuan dan perempuan miskin dimaksudkan untuk mengorganisasikan kekuatan perempuan untuk kebutuhan dan kepentingan strategis. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan seharusnya ditangani oleh perempuan, baik oleh individu perempuan yang peduli, maupun organisasi-organisasi perempuan di masyarakat.

Kelompok Konstituen

Kelompok konstituen adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU BaKTI yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan pemerintah. Dari namanya, Kelompok konstituen adalah organisasi yang dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen. Organisasi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kritis dan memperkuat warga dalam berinteraksi dengan wakil mereka di parlemen maupun dengan pemerintah. Karena itu, kelompok konstituen adalah organisasi warga yang bersifat politis.

Pengurus dan anggota kelompok konstituen meliputi berbagai perwakilan dan lebih dari 70% adalah perempuan, di dalamnya termasuk perempuan miskin. Lebih dari 95% ketua kelompok konstituen adalah perempuan. Dengan struktur kepengurusan dan anggota seperti itu, maka kelompok konstituen merupakan organisasi yang mewakili warga di desa atau kelurahan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan.

Kelompok konstituen merupakan organisasi resmi di desa dan kelurahan, karena mendapatkan pengakuan melalui surat keputusan pengangkatan pengurus dari pemerintah desa atau kelurahan. Dengan begitu, Kelompok Konstituen tidak dimaksudkan menjadi penyaing bagi pemerintah dan organisasi desa/kelurahan yang ada, tetapi menjadi mitra strategis untuk pemenuhan hak-hak warga.

Setelah pembentukan, pengurus dan anggota Kelompok Konstituen telah memperoleh peningkatan kapasitas berupa diskusi, pelatihan, dan studi banding.

Pelatihan yang diperoleh antara lain mengenai hak-hak perempuan, hak asasi manusia (HAM), pengorganisasian, dan penanganan kasus. Sedangkan materi-materi yang didiskusikan meliputi berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat, terutama berhubungan dengan pelayanan publik oleh negara.

Pada awal pendirian, kelompok konstituen membantu warga dalam pengurusan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan pemerintah, seperti pengurusan administrasi kependudukan, beras sejahtera (Rasta) sebelumnya bernama beras miskin (Raskin), kartu BPJS, mengembalikan anak-anak yang putus sekolah, dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.

Seiring dengan perkembangan, kelompok konstituen menjadi organisasi yang mulai diperhitungkan. Kelompok konstituen mampu mengakses anggaran di pemerintah untuk penguatan ekonomi, mereplikasi praktik baik (seperti pertanian alami), bahkan pengurus dan anggota KK mulai masuk di lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, seperti menjadi Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa. Beberapa di antaranya mencalonkan diri menjadi calon legislatif tahun 2019.

Kelompok konstituen menjadi organisasi yang sangat kuat dan kritis dalam memperjuangkan hak-hak warga. Kelompok konstituen telah berkontribusi dalam berbagai arena perencanaan dan penganggaran, seperti Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan), dan terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa.

Kelompok konstituen juga menjadi organisasi mitra anggota DPRD. Pada reses, beberapa kelompok konstituen dipercaya oleh anggota DPRD untuk menyiapkan reses. Kelompok konstituen menjadi mitra kritis anggota DPRD dan pemerintah. Mereka menjadi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kelompoknya sebagai warga negara. Sebagai kelompok kritis, kelompok konstituen diharapkan menjadi warga negara yang sadar akan hak-haknya, sekaligus ikut mendorong kesadaran orang-orang di sekelilingnya untuk menjadi masyarakat yang kritis.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU - BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Selama 15 tahun, majalah **BaKTI**News**** telah dicetak dan distribusikan ke pelosok Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia.

Kini Anda dapat mengakses **BaKTI**News**** dari gawai Anda. Dapatkan informasi terkini tentang inisiatif dan praktik cerdas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Berbagai fitur menarik disajikan untuk memudahkan pembaca memilih artikel dari topik yang diminati. Anda juga dapat berkontribusi mengirimkan artikel ke redaksi majalah **BaKTI**News****. Segera kunjungi:

www.baktinews.bakti.or.id





Kegiatan di BaKTI

24 Juni 2019

FGD Women's Empowerment



Bertempat di Kantor BaKTI Makassar, Mars Indonesia melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertema “*Empower Women in Cocoa Growing Communities*”.

Kegiatan FGD ini, dipimpin langsung oleh Anna Laven dan Pabla Van Heck dari Royal Tropical Institute (KIT), yaitu suatu lembaga penelitian masyarakat dari Belanda yang bertujuan mengetahui peranan perempuan di masyarakat Indonesia. Berbagai *stakeholders* yang fokus kepada pemberdayaan perempuan dan perlindungan turut hadir dan berdiskusi langsung dengan KIT, diantaranya; Lusya Palulungan- Program Manager MAMPU BaKTI,

Nursidah-BKKN, Nur Yasni- Save The Children, dan Nirma Hasyim- Aktifis perempuan.

“Saya sangat bersyukur bisa hadir dalam FGD ini, semoga pengalaman yang saya bagikan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baik bagi program ke masyarakat,” ujar Nursidah.

Menurut Mohammad Khomeiny, (CA Manager Mars Indonesia), kegiatan FGD yang dihadiri oleh beberapa peneliti gender/mantan staf program dan pejabat pemerintah ini sangat bermanfaat, “kami mendapat kesempatan untuk mendengar dan mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang konteks lokal, dan juga pelajaran yang didapat dari program yang sedang dilakukan oleh setiap *stakeholders*,”ujarnya.



27 Juni 2019

Inspirasi BaKTI “Inovasi Kelas Perahu kabupaten Pangkep”

Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Program KOMPAK Sulawesi Selatan menggelar diskusi bertajuk Inspirasi BaKTI yang mengangkat tema “Inovasi Kelas Perahu”, sebuah layanan bagi siswa di daerah kepulauan melalui Pendekatan Pembelajaran menggunakan Lembar Kegiatan Siswa agar siswa tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan pendidikan.

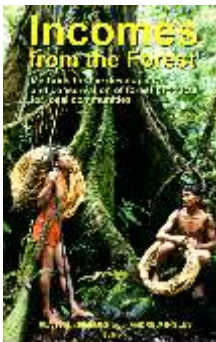
Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi Inovasi Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep kepada berbagai pemangku kepentingan terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulsel dan juga untuk memperoleh masukan terkait upaya replikasi pendekatan layanan pendidikan Kelas Perahu dengan kabupaten/kota yang memiliki wilayah kepulauan di Sulawesi Selatan. Hadir sebagai pembicara adalah Ibu Rukmini, Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan kabupaten Pangkep. Beliau juga adalah Inovator kelas perahu. Narasumber lain adalah Bapak Ahmar Djalil, Provincial Manager program KOMPAK Sulsel. Diskusi ini dimoderatori oleh Andi Yudha Yunus dan dihadiri oleh 45 peserta dari kalangan Pemerintah daerah, akademisi, media, LSM dan mahasiswa.



Jurnal Analisis Sosial: Aksi Petani dan Gerakan Politik Pedesaan

PENERBIT Yayasan Akatiga

Jurnal Analisis Sosial edisi ini menyajikan tulisan-tulisan yang mengangkat tema politik pada para petani di pedesaan, mulai dari tuntutan atas lahan untuk pertanian, refleksi kritis tentang kesesuaian model-model pemecahan persoalan agraria masa kini, hingga kajian berperspektif gender untuk pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara kehidupan domestik konstituen gerakan tani kontemporer dan militansi kaum perempuan di dalam aksi pendudukan tanah.



Incomes from the Forest

EDITOR Eva Wollenberg dan Andrew Ingles

Dalam dua dekade terakhir, telah terjadi peningkatan minat dalam potensi pengumpulan hasil hutan bukan kayu skala kecil dan pemanfaatan hutan dampak ringan lainnya untuk mencapai konservasi hutan. Para ahli menyarankan bahwa pemanfaatan semacam itu tidak menjamin konservasi dan pendapatan ekonomi. Buku ini mendokumentasikan dan membandingkan metode-metode yang digunakan untuk menilai pilihan dalam mata pencaharian berbasis hutan. Enam belas penulis menyajikan kekuatan dan kelemahan dari berbagai metode yang telah digunakan di lapangan.



Jalan Panjang Hak Asasi Manusia

PENULIS Todung Mulya Lubis

Buku ini memuat karya tulis Todung Mulya Lubis mengenai Hak Asasi Manusia, dengan titik perhatian pada persoalan pelanggaran HAM masa lalu dan mereka yang menjadi korban. Tak hanya menunjukkan perhatian dan empati, Mulya Lubis juga banyak menyinggung bagaimana ide kebebasan serta penguatan hukum dan HAM. Rentang tulisan Mulya Lubis ini melintasi masa-masa suram demokrasi di Indonesia, sejak kepemimpinan Soeharto, Habibie, Gus Dur hingga Megawati.



Makassar Abad XIX

PENULIS Edward L. Poelinggomang

Berdasarkan Konvensi London 1814 dan Traktat London 1824, Pemerintah Hindia-Belanda dituntut melaksanakan perdagangan bebas sebagai syarat pengembalian Nusantara dari tangan Inggris. Namun alih-alih mematuhi perjanjian tersebut, pemerintah ini justru berniat melanjutkan kebijakan monopoli yang dijalankan VOC lebih dari 200 tahun, sebagaimana tampak dalam kebijakan perdagangan Makassar. Mengapa Hindia-Belanda enggan melaksanakan perdagangan bebas, terutama di Makassar? Benarkah perdagangan Makassar suram ketika berada di bawah pengawasan VOC maupun Hindia-Belanda? Inilah dua pertanyaan yang hendak dijawab oleh buku ini.